

Deskripsi Analisis Peran Wawasan Nusantara dan Pendidikan Agama dalam Upaya Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia di Era Kontemporer

Galbani Fadilah^{1*}, Busro Busro²

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung; galbanifa@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung; busro@uinsgd.ac.id

Abstract

The character and paradigm of the Indonesian nation in the contemporary era is experiencing many problems, one of which is the birth of the paradigm group of the liberal Indonesian society (MIL), the structuralist Indonesian society (MIS) and the marginalist Indonesian society (MIM) which later gave birth to implicit social inequality. Therefore, this study aims to discuss the three contemporary paradigms and their problems which are then combined with the insight of the archipelago and religious education to find solutions and their handling in efforts to build the character of the Indonesian nation in the contemporary era. This research uses qualitative methods through literature study as well as philosophical and sociological analysis of the phenomena that occur. The results of this study indicate that the insight of the archipelago and also religious education is an ideal solution in overcoming the problems of the Indonesian nation's paradigm in the contemporary era and has a central role in the development of the character of the Indonesian nation if its implementation can be maximized by means of character education which is as it should be.

Keyword: Education, Indonesia, Insight, Nusantara, Religion

Abstrak

Karakter dan paradigma bangsa Indonesia di era kontemporer mengalami banyak permasalahan, salah satunya adalah lahirnya kelompok paradigma masyarakat Indonesia liberal (MIL), masyarakat Indonesia strukturalis (MIS) dan masyarakat Indonesia marginalis (MIM) yang kemudian melahirkan ketimpangan sosial yang sifatnya implisit. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membahas ketiga paradigma kontemporer serta problematikanya yang kemudian dipadukan dengan wawasan nusantara dan pendidikan agama dapat ditemukan solusi serta penanganannya dalam upaya pembangunan karakter bangsa Indonesia di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan serta analisis filsafat dan sosiologi terhadap fenomena yang terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wawasan nusantara dan juga pendidikan agama merupakan solusi yang ideal dalam mengatasi permasalahan paradigma bangsa Indonesia di era kontemporer serta memiliki peran yang sentral terhadap pembangunan karakter bangsa Indonesia jika dalam pengimplementasiannya dapat di maksimalkan dengan cara-cara pendidikan karakter yang memang sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Agama, Indonesia, Nusantara, Pendidikan, Wawasan

1. Pendahuluan

Paradigma masyarakat Indonesia pasca reformasi dapat dikatakan mengalami perubahan yang sangat krusial dan fundamental. Ini karena cara berpikir masyarakat seakan-akan semakin menjauh dari norma dan etika di Indonesia (Setyaningsih, 2016), walaupun tidak dapat dipukul rata seluruh masyarakat Indonesia pasca reformasi memiliki paradigma yang sama, tetapi arus kausalitas yang hadir seolah memaksa untuk merekonstruksi norma-norma agar dapat sesuai dengan kebebasan sikap dan tingkah laku yang tentunya hal tersebut merupakan implikasi dari paradigma masyarakat kontemporer (M. B. Bungin, 2011).

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti dan membahas mengenai konteks yang bersinggungan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu: penelitian yang ditulis oleh M. Burhan Bungin dengan judul *“Masyarakat Indonesia Kontemporer dalam Pusaran Komunikasi”* yang diterbitkan oleh Jurnal Komunikasi pada tahun 2011. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, pembahasan dari penelitian tersebut berfokus pada segmentasi akan tiga ciri masyarakat Indonesia, yakni Masyarakat Indonesia Liberal (MIL), Masyarakat Indonesia Strukturalis (MIS), dan Masyarakat Indonesia Marginalis (MIM) (M. B. Bungin, 2011). Selanjutnya ada juga penelitian dari Deny Setiawan yang diterbitkan di Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial pada tahun 2017 dengan judul *“Kontribusi Tingkat Pemahaman Konsepsi Wawasan Nusantara terhadap Sikap Nasionalisme dan Karakter Kebangsaan”*. Hasil dan pembahasan yang disampaikan dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara faktual suatu fenomena atau realitas yang terjadi dan meliputi kecenderungan pemahaman konsepsi wawasan nusantara, kecenderungan sikap nasionalisme, dan kecenderungan karakter kebangsaan (Setiawan, 2017). Lalu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Rodi Aminullah dan Muslihul Umam dengan judul *“Pancasila Sebagai Wawasan Nusantara”* yang diterbitkan oleh Jurnal Al-Allam pada tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif lewat studi pustaka, pembahasan yang disampaikan dalam penelitian tersebut berfokus pada konsep dan konsepsi mengenai wawasan nusantara yang dimana sangat berkaitan erat dengan Pancasila (Aminullah & Umam, 2020). Dan yang terakhir ada penelitian yang ditulis oleh Marzuki dengan judul *“Revitalisasi Pendidikan Agama di Sekolah dalam Pembangunan Karakter Bangsa di Masa Depan”* dan diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Karakter pada tahun 2013. Pembahasan yang dituangkan dalam penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan meliputi kajian-kajian deskriptif akan pentingnya pendidikan agama di Indonesia serta gagasan akan konsep revitalisasi pendidikan agama di Indonesia agar dapat lebih optimal lagi dalam pelaksanaannya (Marzuki, 2013).

Bertolak dari sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah ditulis sebelumnya, dimana dalam penelitian ini ketiga variabel mengenai segmentasi paradigma masyarakat Indonesia, wawasan nusantara, dan pendidikan agama dituangkan dalam satu tulisan, untuk kemudian dapat diselaraskan dengan upaya pembangunan karakter bangsa Indonesia di era kontemporer.

Berdasarkan paparan diatas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berfokus pada paham wawasan nusantara dan pendidikan agama yang kemudian diselaraskan implikasinya dengan

solusi dari permasalahan ketimpangan akibat dari perubahan paradigma masyarakat Indonesia di era kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sosiologi, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan keterkaitan antara wawasan nusantara dan pendidikan agama dengan solusi mengatasi ketimpangan paradigma yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini, penelitian ini pun mencoba untuk memberikan stimulus terkait dengan eksistensi pendidikan agama dan pentingnya wawasan nusantara bagi masyarakat Indonesia.

Inti rumusan masalah dari penelitian ini adalah: apa itu wawasan nusantara? Bagaimana eksistensi pendidikan agama di Indonesia? Bagaimana paradigma dari masyarakat Indonesia saat ini? Dan apa yang menjadi keterkaitan antara wawasan nusantara dengan permasalahan ketimpangan paradigma di masyarakat Indonesia saat ini.

2. Tinjauan Pustaka/ Literature Review

Bungin dalam penelitiannya yang berjudul “Masyarakat Indonesia Kontemporer dalam Pusaran Komunikasi” mengatakan bahwa setidaknya ada 3 macam paradigma yang eksis dalam masyarakat Indonesia saat ini, yaitu masyarakat Indonesia liberal (MIL), masyarakat Indonesia strukturalis (MIS), dan masyarakat Indonesia marginalis (MIM) (M. B. Bungin, 2011). Masyarakat dengan paham liberal atau MIL merupakan kelompok masyarakat yang seringkali hadir di wilayah perkotaan, tingkat keterpahaman akan teknologinya tinggi, kesadaran akan pendidikannya tinggi, dan memiliki kecenderungan terhadap gaya hidup konsumtif serta seringkali dianggap borjuis.

Adapun mengenai masyarakat Indonesia strukturalis (MIS), ini merupakan kelompok masyarakat yang biasanya hadir di antara perkotaan dan pedesaan dengan memiliki ciri-ciri seperti patuh kepada pimpinan, memiliki ideologi baik itu yang berkembang dari masyarakat maupun agama, berkelompok atau bahkan berorganisasi, memiliki akses terhadap pendidikan, dan dapat dikatakan merupakan bagian dari masyarakat modern (M. B. Bungin, 2011). Lalu terkait dengan masyarakat Indonesia marginal atau MIM, ini merupakan kelompok masyarakat yang hidup di pelosok-pelosok kota dan pedesaan, dicirikan dengan transportasi, komunikasi, dan pendidikan yang kurang, serta seringkali menjadi korban dari sistem sosial dan politik, sehingga memiliki keyakinan yang tinggi terhadap keniscayaan dan agama (M. B. Bungin, 2011).

Jika bertolak dari persoalan diatas, maka dapat dikatakan bahwa hal yang menjadi suatu permasalahan adalah ketimpangan. Ketimpangan sosial yang terjadi salah satunya adalah karena cara pandang serta cara berpikir masyarakat Indonesia saat ini yang memang saling membedakan satu sama lain. Paradigma MIL yang di dukung oleh arus kausalitas (perkembangan sains) seakan memposisikan MIL berada diatas, disusul dengan paradigma MIS dan yang terakhir MIM (Kellner, 2010). Banyak sebetulnya upaya yang dapat di lakukan untuk menangani ketimpangan yang tidak terlihat tersebut, khususnya dengan memaksimalkan peran wawasan nusantara dan pendidikan agama.

Wawasan nusantara sendiri dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk dapat memaksimalkan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi dari wawasan nusantara pun selaras dengan solusi dari problematika kelompok masyarakat

Indonesia saat ini, yang dimana menurut Cristine S.T. Kansil, S.H., MHDKK fungsi wawasan nusantara adalah untuk membina persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia (Kansil, 2003).

Selain itu, Pendidikan agama juga memiliki peran yang fundamental dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia, ditambah lagi hal tersebut memang integral dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (Pemerintah Pusat, 2003) dan No. 2 tahun 1989 (Pemerintah Pusat, 1989), dimana di dalamnya dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Marzuki, 2013).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Metode penelitian kualitatif merupakan metode ilmiah yang sangat umum digunakan oleh akademisi social, agama, dan humaniora (Darmalaksana, 2020). Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji sumber data primer dan skunder melalui studi pustaka, yang dimana dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari buku-buku mengenai wawasan nusantara serta pendidikan agama. Dan sumber data skunder dalam penelitian ini adalah artikel-artikel yang membahas tentang wawasan nusantara dan pendidikan agama. Setelah itu, dilanjutkan dengan klasifikasi berdasarkan formula penelitian, pengolahan data, pengutipan referensi, menampilkan data, abstraksi data, interpretasi data, dan kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

4. Hasil Penelitian

1. Paradigma Masyarakat Indonesia di Era Kontemporer

Di bagian pendahuluan telah dijelaskan secara singkat mengenai tiga macam paradigma yang hadir di kelompok masyarakat Indonesia saat ini. Ketiga macam cara berpikir tersebut tentunya memiliki cirinya masing-masing, masyarakat Indonesia liberal (MIL) dengan keterpahaman dan kesadaran akan teknologi serta pendidikan yang tinggi, lalu masyarakat Indonesia strukturalis yang memiliki ideologi agama dan masyarakat serta berkecenderungan untuk guyub, dan masyarakat Indonesia marginalis yang dicirikan dengan terbatasnya transportasi, komunikasi, dan pendidikan, serta seringkali menjadi korban dari sistem sosial dan politik (M. B. Bungin, 2011).

Dari ketiga macam paradigma tersebut, masing-masing memiliki kecenderungan untuk saling menguasai terhadap yang tidak berdaya, dan tentunya hal tersebut berdampak pada lahirnya ketimpangan sosial, baik itu yang terlihat ataupun tidak terlihat. Namun secara umum, ketiga macam paradigma kelompok masyarakat Indonesia tersebut memiliki kesamaan, dimana ketiganya sama-sama mengadopsi kehidupan modern dengan penafsirannya masing-masing (B. Bungin, 2009). Masyarakat Indonesia kontemporer ini juga memiliki sifat agresif yang tinggi, kurang memahami sopan santun, dan terkadang mengabaikan etika.

Jika ditarik lagi ke masa lalu, paradigma masyarakat kontemporer Indonesia ini dapat dikatakan sebagai implikasi dari lahirnya reformasi. Dorongan politik di masa orba-reformasi

sangat kuat, dimana di era awal reformasi, corong-corong komunikasi terkesan sangat frontal dalam melakukan kegiatan politik untuk memukul rata lawan-lawan politik, yang kemudian disusul dengan etika politik yang juga hancur-hancuran, tidak ada lawan dan kawan, bahkan moralitas lembaga baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif pun merosot jauh (M. B. Bungin, 2011). Hal inilah yang kemudian melahirkan ketidakpuasan dan kekecewaan dari masyarakat terhadap tindak tanduk ketiga lembaga tersebut, serta memberi kesan malfunction, dimana jika rakyat kuat maka pemerintah lemah, begitupun sebaliknya (Rosana, 2016). Dan ketidakpuasan serta kekecewaan masyarakat tersebut seolah melegitimasi arus kausalitas paradigma yang individual (selaras dengan MIL).

Masyarakat Indonesia liberal yang memiliki corak hedonis dan konsumtif tentu hanya dapat digapai oleh kelompok masyarakat yang kondisi ekonominya cukup atau lebih, sehingga dampaknya lahirlah masyarakat Indonesia strukturalis yang memanfaatkan akses teknologi serta pendidikan untuk dapat masuk ke lingkup modern, walaupun hal tersebut seringkali terhambat dengan kondisi ekonomi. Sedangkan masyarakat Indonesia marginal hanya dapat menjadi penonton dari tindak-tanduk MIL dan MIS tersebut. Tekanan hedonisme dan konsumerisme yang eksis akibat dari arus kausalitas sains dan implikasi dari pasca reformasi tersebut kemudian memberikan ruang bebas bagi ketimpangan sosial (Veeger, 1993). Ketiganya (MIL, MIS, dan MIM) seakan berlomba-lomba untuk saling menguasai dan bertahan hidup.

Kompetisi tersebut kemudian melahirkan sensitifitas yang tinggi. Dimana MIL dan MIS mudah untuk tersinggung dan tersulut amarahnya, serta seringkali menjadi korban dari adu domba. Namun sensitifitas ini juga melahirkan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sosial, tapi bukan kepedulian yang substansial, melainkan kepedulian yang di dasari oleh kepentingan-kepentingan seperti popularitas, kedudukan, dan status sosial, yang kemudian sensitifitas ini disebut dengan sensitifitas semu (Veeger, 1993). Dikalangan orang bawah atau MIM pun tidak lepas dari sensitifitas semu. Seruan dan perlawanan terhadap kaum-kaum elite tidaklah murni untuk merekonstruksi, namun untuk mempertahankan kelas-kelasnya sendiri.

2. Mengenai Wawasan Nusantara dan Eksistensi Pendidikan Agama

Wawasan nusantara secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan nusantara, dimana wawasan berasal dari kata wawas yang artinya pandangan, dan nusantara yang berasal dari kata nusa dan antara. Nusa berarti kepulauan, dan antara artinya letak antara dua unsur. Sehingga nusantara dapat diartikan sebagai kesatuan kepulauan yang letaknya berada diantara dua benua (Asia-Australia) dan samudra (Hindia-Pasifik). Namun dalam interpretasi modern, nusantara digunakan sebagai kata pengganti dari nama Indonesia (Aminullah & Umam, 2020).

Secara terminologi, wawasan nusantara memiliki banyak arti, seperti menurut prof. Wan Usman, ia berpendapat bahwa wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap tanah air sebagai Negara kepulauan. Lalu ada juga penjelasan berdasarkan GBHN 1998 yang mengartikan wawasan nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan isi dari usulan tap MPR yang dibuat oleh Lemhannas, wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam dan strategis dengan mengutamakan persatuan juga kesatuan dalam

menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan nasional.

Wawasan nusantara sendiri hakikatnya merupakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah, yang juga tercantum dalam GBHN bahwa wawasan nusantara diwujudkan dengan menyatakan wilayah (kepulauan) nusantara merupakan kesatuan dari ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan politik. Lalu mengenai dasar ajaran dari wawasan nusantara, ada dua landasan yang menjadi dasar ajaran, yaitu landasan idiil pancasila, yang dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kebersamaan, keseimbangan, keselarasan dan kekeluargaan, dan landasan konstitusional (Pandoyo, 1985).

Selain itu, ada tiga unsur dasar dari wawasan nusantara. Yang pertama yaitu wadah, yang berarti Indonesia merupakan wadah dari berbagai macam organisasi kenegaraan dan kegiatan bermasyarakat yang dikemas dalam wujud infrastruktur politik-suprastruktur politik. Kedua adalah isi, ini merupakan aspirasi dan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dan yang ketiga adalah tata laku yang berarti interaksi antara wadah dan isi, baik itu berupa tata laku batiniah maupun tata laku lahiriah (Pandoyo, 1985). Wawasan nusantara sendiri pun memiliki dasar hukum, yaitu tap MPR. No. IV/MPR/1973 pada tanggal 22 maret 1973, tap MPR. No IV/1978/22/Maret/1978/ tentang GBHN, dan tap MPR. No. II/MPR/1983/12/Maret/1983 (Kansil, 2003).

Lalu, fungsi dari wawasan nusantara ini secara umum adalah sebagai pedoman dan rambu-rambu terhadap segala rupa tata kelola dan sikap bangsa Indonesia, sedangkan menurut Cristine S.T. Kansil, S.H., MHDKK fungsi wawasan nusantara adalah untuk membina persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia (Kansil, 2003). Fungsi tersebut tentunya dibarengi oleh asas-asas dari wawasan nusantara itu sendiri, yaitu kepentingan yang sama, keadilan, solidaritas, kejujuran, kerja sama, kesetiaan dan arah pandang. Di bagian arah pandang, terbagi dua bagian, yaitu arah pandang ke dalam (Indonesia harus peka terhadap hal-hal yang menyangkut internal dan sedini mungkin untuk diatasi jika menyebabkan permasalahan dan konflik) dan arah pandang keluar (Indonesia harus senantiasa mengamankan kepentingan nasionalnya dalam segala aspek seperti ekonomi, sosial budaya, dan bahkan keamanan serta pertahanan) (Aminullah & Umam, 2020).

Lalu mengenai eksistensi pendidikan agama sendiri, di Indonesia sendiri agama menjadi salah satu pondasi utama untuk membangun karakter bangsa, hal tersebut dibuktikan dengan ada UU No. 20 Tahun 2003 dalam pasal 37 ayat 1a dan 2a yang di dalamnya dikatakan bahwa kurikulum semua jenjang pendidikan harus memuat pendidikan agama (Pemerintah Pusat, 2003). Ada juga peraturan lain yang mempertegas hal tersebut, seperti pada Peraturan Pemerintah No. 19 terkhusus dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2, UU Sisdiknas 2003 pasal 12 ayat 1a, dan yang paling rinci serta terbaru ada pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007. PP No. 55/2007 secara keseluruhan tersusun atas 6 bab dan 51 pasal, terkait dengan pembahasan-pembahasan penting dalam peraturan tersebut diantaranya adalah: Pertama, maksud dari pendidikan agama adalah memberikan wawasan/pengetahuan, membangun kepribadian, sikap, serta keterampilan dalam mengimplementasikan agamanya. Kedua, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan membentuk kesiapan peserta didik untuk dapat menjalankan peran-peran mengenai ajaran agama atau mengamalkan ajaran agamanya. Ketiga, istilah-istilah penting terkait lembaga yang berhubungan dengan pendidikan agama, seperti

pondok pesantren (dalam Islam), Pabbaja Samanera (dalam Buddha), Pasraman dan Pesantian (dalam Hindu), Shuyuan (dalam Konghucu), dan lain-lain. Keempat, Pendidikan agama memiliki fungsi untuk membangun manusia Indonesia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak yang mulia dan mampu membangun kerukunan antarumat beragama. Kelima, setiap satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan harus memberikan pendidikan agama lewat mata kuliah atau mata pelajaran agama, dan tiap-tiap peserta didik dalam semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya. Keenam, Pendidikan agama harus dapat menstimulus peserta didik untuk kemudian dapat taat terhadap ajaran agamanya dan menjadikan agamanya sebagai landasan etika serta moral. Ketujuh, pendidikan agama sendiri bertujuan untuk membangun kerukunan, rasa hormat, dan keharmonisan antara sesama pemeluk agama dan antara pemeluk agama yang berbeda. Kedelapan, pendidikan agama juga harus dapat menjadi instrumen penting dalam membangun mental dan sikap peserta didik untuk dapat berlaku disiplin, bekerja keras, kooperatif, kompetitif, bertanggung jawab, tulus, mandiri, percaya diri, dan jujur. Kesembilan, harapan akan hadir dan terlaksananya pendidikan agama adalah untuk menumbuhkan sikap dinamis, inovatif, dan kritis terhadap tiap-tiap peserta didik (Pemerintah Pusat, 2007). Bertolak dari penjelasan akan pembahasan-pembahasan penting dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007, dapat dikatakan bahwa pendidikan agama mengarahkan bangsa Indonesia untuk dapat membangun karakter yang salih, baik itu secara individu maupun sosial, untuk kemudian dapat membantu dan berperan penting dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia (Marzuki, 2013).

3. Revitalisasi Wawasan Nusantara dan Pendidikan Agama di Indonesia

Bertolak dari kedua pembahasan sebelumnya, dimana telah dipaparkan mengenai paradigma masyarakat Indonesia di era kontemporer dan wawasan nusantara, terdapat keterkaitan antara keduanya, terutama mengenai wawasan nusantara sebagai solusi dari permasalahan ketiga paradigma masyarakat Indonesia saat ini (masyarakat Indonesia liberal, masyarakat Indonesia strukturalis, masyarakat Indonesia marginalis) seperti ketimpangan sosial, agresivitas yang tinggi, dan sensitivitas semu (M. B. Bungin, 2011).

Permasalahan ketimpangan akan paradigma yang kemudian melahirkan banyak masalah baru di era kontemporer ini sangat bertentangan dengan apa yang tertera dalam wawasan nusantara. Wawasan nusantara yang kental dengan nuansa persatuan, kesatuan, kebersamaan, gotong royong, dan sebagainya sebetulnya dapat menjadi solusi yang ideal bagi permasalahan tersebut, begitupun dengan permasalahan terkait dengan agresivitas yang tinggi dan sensitivitas yang semu (Tualeka, 2017). Ketiga masalah sentral dari tiga paradigma yang kemudian dapat diatasi dengan doktrin wawasan nusantara tentunya dapat dikatakan sebagai tantangan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat melahirkan sintesis diantara tesis (permasalahan paradigma masyarakat Indonesia) dan antitesis (doktrin wawasan nusantara), karena dalam asas-asas wawasan nusantara terdapat penjelasan mengenai arah pandang ke dalam, dimana dikatakan bahwa Indonesia harus peka terhadap hal-hal yang menyangkut internal dan sedini mungkin untuk diatasi jika menyebabkan permasalahan dan konflik (Pandoyo, 1985).

Dalam poin c nomor 2 pada bagian wawasan nusantara dalam tap MPR. No. IV/MPR/1973 tercantum “Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, se-Bangsa dan se-Tanah Air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita Bangsa” (Kansil, 2003). Tap MPR. No. IV/MPR/1973 ini kemudian dapat menjadi legitimasi akan asumsi bahwa wawasan nusantara sangat ideal untuk mengatasi permasalahan masyarakat Indonesia di era kontemporer .

Wawasan nusantara yang ideal sebagai solusi akan permasalahan bangsa Indonesia tentunya tidak dapat serta-merta sukses peranannya jika hanya dikaji secara teoretis. Wawasan nusantara sejatinya haruslah menjadi motivasi dan bahkan pedoman bangsa Indonesia. Dalam mengimplementasikan doktrin-doktrin wawasan nusantara pun tidak bisa hanya secara verbalistik semata, melainkan harus ada penyuluhan lebih lanjut terkait dengan wawasan nusantara. Pembangunan karakter bangsa merupakan sesuatu yang hanya dapat diwujudkan oleh proses yang panjang dan konsisten (Abubakar, 2012). Dalam hal ini, doktrin terkait dengan konsepsi wawasan nusantara harus dapat hadir disetiap lingkup pendidikan serta doktrin yang disampaikan tidak hanya menyentuh aspek moral knowing (kognitif) saja, tetapi juga harus dapat menyentuh moral awareness dan moral feeling (Suyatno, 2009).

Seperti apa yang dikatakan oleh Thomas Lickona, bahwa pembangunan karakter haruslah memenuhi ruang-ruang dimensi secara utuh, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik (Muqsith, 2019). Selaras dengan ketiga dimensi tersebut, Buchori mengatakan bahwa untuk dapat membangun karakter, maka langkah yang diambil adalah dengan pengenalan akan nilai kognitif, pengukuhan nilai secara afektif, dan pengimplementasian secara psikomotorik dalam ruang praksis (Setiawan, 2017).

Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan karakter dan pemecahan masalah terkait dengan paradigma masyarakat Indonesia di era kontemporer dapat diatasi dengan doktrin wawasan nusantara lewat pendekatan-pendekatan seperti yang dikatakan oleh Thomas Lickona dan Buchori, dimana ketiga dimensi karakter (kognitif, afektif, psikomotorik) harus dioptimalkan prosesnya dalam pembangunan karakter dan paradigma bangsa Indonesia di era kontemporer (Setiawan, 2017).

Selaras dengan sebelumnya, pendidikan agama yang menjadi salah satu pondasi penting dalam membangun karakter bangsa harus dapat di revitalisasi. Ini karena optimalisasi akan peran pendidikan agama dapat dikatakan terhambat di ruang pelaksanaan, dimana kompetensi pokok sebagai pendidik seringkali dialienasikan (Malli, 2016). Padahal dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tercantum bahwa standar kompetensi pendidik (termasuk pendidik agama) harus memenuhi 4 kompetensi pokok, yaitu pedagogik, kepribadian, dan profesional serta sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidik agama tidak sekadar melakukan tugas sesuai dengan interval waktu yang diberikan atau juga sebatas memenuhi materi yang ditargetkan, namun harus benar-benar dapat mengaktualisasikan hasil dari standar keempat kompetensi tersebut (Pemerintah Pusat, 2005).

Permulaan revitalisasi pendidikan agama memang harus dimulai dari subjek dan untuk subjek, dalam artian konsep akan pendidikan tidak akan dapat terealisasi jika subjek yang ikut serta tidak sesuai dengan konsep pendidikan yang ada (Laode Monto Bauto, 2014). Namun, keberhasilan pendidikan pun tidak semata-mata merupakan tanggung jawab tenaga

pendidik, melainkan semua instrumen pendidikan harus dapat dioptimalkan (Marzuki, 2013). Karena konsistensi akan pendidikan dapat dibantu pergerakannya dengan partisipasi segala unsur dalam atmosfer pendidikan tersebut. Seperti apa yang dikatakan oleh Ryan dan Bohlin dalam buku "Building Character in Schools: Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life" bahwa pendidikan karakter memiliki tiga unsur utama, yaitu knowing good, loving the good, dan doing the good, yang dimana pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan benar atau salah, melainkan penanaman akan kebiasaan mengenai apa yang baik, sehingga konsistensi dan partisipasi seluruh elemen pendidikan harus dapat dioptimalkan (Ryan et al., 1999).

5. Kesimpulan

Wawasan nusantara yang berfungsi sebagai motivasi serta pedoman bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertata laku tentunya dapat lebih di maksimalkan lagi. Permasalahan akan ketimpangan, kompetisi kepentingan, agresivitas yang tinggi, dan sensitivitas yang semu di masyarakat Indonesia saat ini secara sederhana dapat diatasi jika optimalisasi dalam pengimplementasian wawasan nusantara dapat dilakukan, begitu pun dengan pendidikan agama. Pendidikan agama harus dapat dioptimalkan lewat pemenuhan keempat standar kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian profesional, dan sosial.

Dalam membangun karakter bangsa, tidak cukup jika hanya sekadar bertumpu pada penyuluhan verbalistik, tetapi harus juga melalui prosedur pembangunan karakter seperti yang dikatakan oleh Thomas Lickona dan Buchori, yaitu bahwa pembangunan karakter tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga afektif serta psikomotorik, yang dimana hal tersebut dapat diterapkan terhadap pengimplementasian wawasan nusantara dan pendidikan agama dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia di era kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan stimulus berupa wawasan nusantara, permasalahan paradigma masyarakat Indonesia, serta semangat dan upaya pembangunan karakter bangsa Indonesia lewat optimalisasi dalam pengimplementasian wawasan nusantara dan pendidikan agama.

Referensi

- Abubakar, I. (2012). Moralitas Haya sebagai Core Value Pendidikan Karakter. *Jurnal El-Hikmah*.
- Aminullah, R., & Umam, M. (2020). Pancasila Sebagai Wawasan Nusantara. *Al-Allam*, 1(1), 1–16.
- Bungin, B. (2009). *Sosiologi Komunikasi*. Prenada Media.
- Bungin, M. B. (2011). Masyarakat Indonesia dalam Pusaran Komunikasi. *Jurnal Komunikasi*, 1(2), 125–136.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Kansil, C. S. T. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. PT Pradnya Paramita.
- Kellner, D. (2010). *Budaya Media; Cultural Studies, Identitas dan Politik: Antara Modern dan Postmodern*. Jalasutra.
- Laode Monto Bauto. (2014). PERSPEKTIF AGAMA DAN KEBUDAYAAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama).

- Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23, 24.
- Malli, R. (2016). KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA. *Tarbawi*, 1, 159–166.
- Marzuki. (2013). Revitalisasi Pendidikan Agama di Sekolah dalam Pembangunan Karakter Bangsa di Masa Depan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(1), 64–76.
- Muqsith, M. A. (2019). Pemuda, Globalisasi dan Perubahan Sosial. *'Adalah*, 3(4), 19–25. <https://doi.org/10.15408/adalah.v3i4.17925>
- Pandoyo, S. T. (1985). *Wawasan Nusantara dan Implementasi dalam UUD 1945 serta Pembangunan Nasional*. Rineka Cipta.
- Pemerintah Pusat. (1989). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Pemerintah Pusat. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Pemerintah Pusat. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Pemerintah Pusat. (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal TAPIS*, 12(1), 37–53.
- Ryan, Kevin, & Bohlin. (1999). *Building Character in Schools: Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life*. Jossey Bass.
- Setiawan, D. (2017). Kontribusi Tingkat Pemahaman Konsepsi Wawasan Nusantara Terhadap Sikap Nasionalisme dan Karakter Kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 24–33.
- Setyaningsih. (2016). Dampak Globalisasi Terhadap Moral Generasi Muda. *Sanjiwani*.
- Suyatno. (2009). *Urgensi Pendidikan Karakter*. Depdiknas.
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern. *Al-Hikmah*, 3(1), 32–48. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>
- Veeger, K. J. (1993). *Realitas Sosial*. Gramedia.